

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, PNB, ANGGARAN TRANSFER KE  
DAERAH, DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

I. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNB

1. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

<b>1. Pendapatan pajak dalam negeri</b>	<b>1.226.474.170.684.000,00</b>
1.1 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	586.306.470.234.000,00
1.1.1 Pendapatan PPh migas	76.073.625.000.000,00
1.1.1.1 Pendapatan PPh minyak bumi	30.311.276.000.000,00
1.1.1.2 Pendapatan PPh gas bumi	45.762.349.000.000,00
1.1.2 Pendapatan PPh nonmigas	510.232.845.234.000,00
1.1.2.1 Pendapatan PPh Pasal 21	116.824.900.384.000,00
1.1.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22	10.370.314.557.000,00
1.1.2.3 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	50.014.271.180.000,00
1.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23	37.309.965.250.000,00
1.1.2.5 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	7.355.441.000.000,00
1.1.2.6 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	174.763.737.200.000,00
1.1.2.7 Pendapatan PPh Pasal 26	39.022.027.000.000,00
1.1.2.8 Pendapatan PPh final	74.515.960.373.000,00
1.1.2.9 Pendapatan PPh nonmigas lainnya	56.228.290.000,00
1.2 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	492.950.875.000.000,00
1.3 Pendapatan pajak bumi dan bangunan	25.441.872.000.000,00
1.4 Pendapatan cukai	116.284.000.000.000,00
1.4.1 Pendapatan cukai	116.284.000.000.000,00
1.4.1.1 Pendapatan cukai hasil tembakau	110.700.000.000.000,00
1.4.1.2 Pendapatan cukai ethyl alkohol	200.000.000.000,00
1.4.1.3 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	5.384.000.000.000,00
1.5 Pendapatan pajak lainnya	5.490.953.450.000,00
<b>2. Pendapatan pajak perdagangan internasional</b>	<b>53.914.800.000.000,00</b>
2.1 Pendapatan bea masuk	33.936.600.000.000,00
2.2 Pendapatan bea keluar	19.978.200.000.000,00

2. RINCIAN PNB

<b>1. Penerimaan sumber daya alam</b>	<b>225.954.696.223.000,00</b>
1.1 Penerimaan sumber daya alam migas	196.508.274.000.000,00
1.1.1 Pendapatan minyak bumi	142.943.079.000.000,00
1.1.2 Pendapatan gas alam	53.565.195.000.000,00
1.2 Penerimaan sumber daya alam nonmigas	29.446.422.223.000,00
1.2.1 Pendapatan pertambangan mineral dan batubara	23.599.745.000.000,00
1.2.1.1 Pendapatan iuran tetap	1.071.826.000.000,00
1.2.1.2 Pendapatan royalti	22.527.919.000.000,00

1.2.2	Pendapatan kehutanan	5.017.016.000.000,00
1.2.2.1	Pendapatan dana reboisasi	2.440.000.000.000,00
1.2.2.2	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.790.444.000.000,00
1.2.2.3	Pendapatan IIUPH (IHPH)	146.250.000.000,00
1.2.2.3.1	Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri	11.250.000.000,00
1.2.2.3.2	Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam	135.000.000.000,00
1.2.2.4	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	640.322.000.000,00
1.2.3	Pendapatan perikanan	250.000.001.000,00
1.2.4	Pendapatan panas bumi	579.661.222.000,00
1.2.4.1	Pendapatan pertambangan panas bumi	564.850.000.000,00
1.2.4.2	Pendapatan iuran tetap pertambangan panas bumi	14.811.222.000,00
<b>2.</b>	<b>Pendapatan bagian laba BUMN</b>	<b>40.000.000.000.000,00</b>
2.1	Pendapatan laba BUMN perbankan	10.300.000.000.000,00
2.2	Pendapatan laba BUMN non perbankan	29.700.000.000.000,00
<b>3.</b>	<b>PNBP lainnya</b>	<b>94.087.605.717.000,00</b>
3.1	Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan	31.538.985.208.000,00
3.1.1	Pendapatan penjualan hasil produksi/ sitaan	17.367.147.273.000,00
3.1.1.1	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	6.848.075.000,00
3.1.1.2	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	22.102.468.000,00
3.1.1.3	Pendapatan penjualan hasil tambang	16.066.526.027.000,00
3.1.1.4	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	50.000.000.000,00
3.1.1.5	Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi Lainnya	195.000.000,00
3.1.1.6	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya	16.231.482.000,00
3.1.1.7	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	65.792.000,00
3.1.1.8	Pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah dalam rangka operasi pasar murni	1.200.000.000.000,00
3.1.1.9	Pendapatan penjualan lainnya	5.178.429.000,00
3.1.2	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	129.436.240.000,00
3.1.2.1	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	50.549.430.000,00
3.1.2.2	Pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin	33.848.578.000,00
3.1.2.3	Pendapatan penjualan sewa beli	20.000.000.000,00
3.1.2.4	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	25.038.232.000,00
3.1.3	Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas	13.733.362.500.000,00
3.1.3.1	Pendapatan minyak mentah (DMO)	13.446.700.000.000,00
3.1.3.2	Pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas	286.662.500.000,00
3.1.4	Pendapatan dari pemanfaatan BMN	309.039.195.000,00
3.1.4.1	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	213.557.306.000,00
3.1.4.2	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	69.780.517.000,00
3.1.4.3	Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan	235.820.000,00
3.1.4.4	Pendapatan dari KSP tanah, gedung,	

	dan bangunan	500.000.000,00
	3.1.4.5 Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya	24.965.552.000,00
3.2	Pendapatan jasa	30.978.493.357.000,00
3.2.1	Pendapatan jasa I	16.909.228.739.000,00
3.2.1.1	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	44.372.778.000,00
3.2.1.2	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	23.109.033.000,00
3.2.1.3	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	2.203.341.600.000,00
3.2.1.4	Pendapatan hak dan perijinan	10.928.806.714.000,00
3.2.1.5	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	218.028.367.000,00
3.2.1.6	Pendapatan jasa, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan pendapatan DJBC	656.731.300.000,00
3.2.1.7	Pendapatan jasa kantor urusan agama	82.250.670.000,00
3.2.1.8	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	993.151.358.000,00
3.2.1.9	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.759.436.919.000,00
3.2.2	Pendapatan jasa II	984.151.709.000,00
3.2.2.1	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	58.669.655.000,00
3.2.2.2	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	745.032.938.000,00
3.2.2.3	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00
3.2.2.4	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	624.000.000,00
3.2.2.5	Pendapatan bea lelang	129.438.841.000,00
3.2.2.6	Pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara	40.290.000.000,00
3.2.2.7	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	6.070.000.000,00
3.2.3	Pendapatan jasa luar negeri	517.382.070.000,00
3.2.3.1	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	404.123.083.000,00
3.2.3.2	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	103.158.086.000,00
3.2.3.3	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	10.100.901.000,00
3.2.4	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan ( <i>treasury single account</i> ) dan/atau jasa penempatan uang negara	6.200.000.000.000,00
3.2.4.1	Pendapatan dari pelaksanaan <i>treasury national pooling</i>	195.000.000.000,00
3.2.4.2	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	6.005.000.000.000,00
3.2.5	Pendapatan jasa kepolisian I	4.329.332.750.000,00
3.2.5.1	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	1.007.057.710.000,00
3.2.5.2	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	1.202.885.925.000,00
3.2.5.3	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	64.701.800.000,00
3.2.5.4	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	1.171.452.260.000,00
3.2.5.5	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	848.808.480.000,00
3.2.5.6	Pendapatan ujian keterampilan	

	mengemudi melalui simulator	32.172.700.000,00
3.2.5.7	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.253.875.000,00
3.2.6	Pendapatan jasa kepolisian II	403.262.253.000,00
3.2.6.1	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	63.907.725.000,00
3.2.6.2	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	59.241.510.000,00
3.2.6.3	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	11.831.200.000,00
3.2.6.4	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	268.281.818.000,00
3.2.7	Pendapatan jasa lainnya	1.635.135.836.000,00
3.2.7.1	Pendapatan jasa lainnya	1.615.773.252.000,00
3.2.7.2	Pendapatan bea lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	2.593.266.000,00
3.2.7.3	Pendapatan bea lelang pegadaian	16.769.318.000,00
3.3	Pendapatan bunga	9.089.773.181.000,00
3.3.1	Pendapatan bunga	1.106.494.192.000,00
3.3.1.1	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.106.310.000.000,00
3.3.1.2	Pendapatan bunga lainnya	184.192.000,00
3.3.2	Pendapatan premium atas obligasi negara	7.983.278.989.000,00
3.4	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	137.743.590.000,00
3.4.1	Pendapatan legalisasi tanda tangan	3.593.255.000,00
3.4.2	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	661.385.000,00
3.4.3	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	6.319.345.000,00
3.4.4	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	104.310.770.000,00
3.4.5	Pendapatan ongkos perkara	732.000,00
3.4.6	Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi	2.000.000.000,00
3.4.7	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	20.858.103.000,00
3.5	Pendapatan pendidikan	2.775.932.606.000,00
3.5.1	Pendapatan uang pendidikan	1.762.088.665.000,00
3.5.2	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	126.719.701.000,00
3.5.3	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	80.443.041.000,00
3.5.4	Pendapatan pendidikan lainnya	806.681.199.000,00
3.6	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	71.343.500.000,00
3.6.1	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	38.961.500.000,00
3.6.2	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	3.100.000.000,00
3.6.3	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	29.282.000.000,00
3.7	Pendapatan iuran dan denda	672.269.692.000,00
3.7.1	Pendapatan iuran badan usaha	600.000.000.000,00
3.7.1.1	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000,00
3.7.1.2	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	120.000.000.000,00
3.7.2	Pendapatan dari perlindungan hutan	

	dan konservasi alam	57.964.210.000,00
3.7.2.1	Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup	9.533.537.000,00
3.7.2.2	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	1.761.734.000,00
3.7.2.3	Pungutan masuk obyek wisata alam	46.395.582.000,00
3.7.2.4	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	273.357.000,00
3.7.3	Pendapatan denda I	14.283.932.000,00
3.7.3.1	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah	10.838.932.000,00
3.7.3.2	Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha	105.000.000,00
3.7.3.3	Pendapatan denda pelaksanaan rekening pengeluaran bersaldo nihil dalam rangka TSA	460.000.000,00
3.7.3.4	Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pelimpahan penerimaan negara oleh bank/ pos persepsi	2.880.000.000,00
3.7.4	Pendapatan denda II	21.550.000,00
3.7.4.1	Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pelimpahan saldo BO II ke BO I	550.000,00
3.7.4.2	Pendapatan denda atas kekurangan/ keterlambatan pembagian PBB oleh BO III PBB	21.000.000,00
3.8	Pendapatan lain-lain	18.823.064.583.000,00
3.8.1	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	12.911.146.156.000,00
3.8.1.1	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	2.269.992.898.000,00
3.8.1.2	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	20.487.000,00
3.8.1.3	Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL	3.300.000,00
3.8.1.4	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	10.641.129.471.000,00
3.8.2	Pendapatan pelunasan piutang	12.446.423.000,00
3.8.2.1	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	269.434.000,00
3.8.2.2	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)	12.176.989.000,00
3.8.3	Pendapatan dari selisih kurs	2.090.547.029.000,00
3.8.4	Pendapatan lain-lain	3.808.924.975.000,00
3.8.4.1	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	30.245.985.000,00
3.8.4.2	Pendapatan dari biaya pengawasan HET minyak tanah	18.597.000,00
3.8.4.3	Pendapatan penyeteroran kelebihan hasil bersih lelang yan tidak diambil oleh yang berhak	107.500.000,00
3.8.4.4	Pendapatan anggaran lain-lain	3.778.552.893.000,00
<b>4.</b>	<b>Pendapatan badan layanan umum</b>	<b>25.349.427.015.000,00</b>
4.1	Pendapatan jasa layanan umum	22.033.715.541.000,00
4.1.1	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	18.721.167.371.000,00
4.1.1.1	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	6.686.892.322.000,00

4.1.1.2	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	8.615.403.419.000,00
4.1.1.3	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	223.191.345.000,00
4.1.1.4	Pendapatan jasa pencetakan	2.389.175.000,00
4.1.1.5	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	2.189.409.337.000,00
4.1.1.6	Pendapatan jasa layanan pemasaran	1.410.000.000,00
4.1.1.7	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	1.002.471.773.000,00
4.1.2	Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	846.538.123.000,00
4.1.2.1	Pendapatan pengelolaan kawasan otorita	697.807.496.000,00
4.1.2.2	Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya	148.730.627.000,00
4.1.3	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	2.466.010.047.000,00
4.1.3.1	pendapatan program modal ventura	2.137.813.000,00
4.1.3.2	Pendapatan program dana bergulir sektoral	587.568.130.000,00
4.1.3.3	Pendapatan program dana bergulir syariah	21.801.775.000,00
4.1.3.4	Pendapatan investasi	692.502.329.000,00
4.1.3.5	Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya	1.162.000.000.000,00
4.2	Pendapatan hibah badan layanan umum	128.264.881.000,00
4.2.1	Pendapatan hibah terikat	125.168.573.000,00
4.2.1.1	Pendapatan hibah terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha	94.053.761.000,00
4.2.1.2	Pendapatan hibah terikat dalam negeri - pemda	31.114.812.000,00
4.2.2	Pendapatan hibah tidak terikat	3.096.308.000,00
4.2.2.1	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha	2.096.308.000,00
4.2.2.2	Pendapatan hibah tidak terikat lainnya	1.000.000.000,00
4.3	Pendapatan hasil kerja sama BLU	2.001.812.105.000,00
4.3.1	Pendapatan hasil kerja sama perorangan	16.476.598.000,00
4.3.2	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	1.882.753.577.000,00
4.3.3	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	102.581.930.000,00
4.4	Pendapatan BLU lainnya	1.185.634.488.000,00

## II. RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

### 1. RINCIAN DANA PERIMBANGAN

<b>1. Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>113.711.676.218.000,00</b>
1.1 DBH Pajak	51.787.157.746.000,00
1.1.1 DBH Pajak Penghasilan	25.713.964.277.000,00
1.1.1.1 Pajak penghasilan Pasal 21	24.225.165.077.000,00
1.1.1.1.1 DBH Pasal 21	23.364.980.077.000,00
1.1.1.1.1.2 Kurang Bayar Pasal 21	860.185.000.000,00
1.1.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.488.799.200.000,00
1.1.1.2.1 DBH Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.471.088.200.000,00

1.1.1.2.2 Kurang Bayar Pasal 25/29 Orang Pribadi	17.711.000.000,00
1.1.2 DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.859.193.469.000,00
1.1.2.1 DBH PBB Murni	23.852.984.469.000,00
1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PBB	6.209.000.000,00
1.1.3 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.214.000.000.000,00
1.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)	61.924.518.472.000,00
1.2.1 DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	38.849.199.293.000,00
1.2.1.1 Minyak Bumi	22.511.814.920.000,00
1.2.1.1.1 DBH Minyak Bumi	22.154.353.920.000,00
1.2.1.1.2 Kurang Bayar Minyak Bumi	357.461.000.000,00
1.2.1.2 Gas Bumi	16.337.384.373.000,00
1.2.2 DBH SDA Pertambangan Umum	19.835.876.000.000,00
1.2.2.1 Iuran Tetap	890.273.800.000,00
1.2.2.1.1 DBH Iuran Tetap Murni	857.460.800.000,00
1.2.2.1.2 Kurang Bayar Iuran Tetap	32.813.000.000,00
1.2.2.2 Royalti	18.945.602.200.000,00
1.2.2.2.1 DBH Royalti Murni	18.022.335.200.000,00
1.2.2.2.2 Kurang Bayar Royalti	923.267.000.000,00
1.2.3 DBH SDA Kehutanan	2.572.331.200.000,00
1.2.3.1 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.446.894.200.000,00
1.2.3.1.1 DBH PSDH Murni	1.432.355.200.000,00
1.2.3.1.2 Kurang Bayar PSDH	14.539.000.000,00
1.2.3.2 Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	136.883.000.000,00
1.2.3.2.1 DBH IIUPH Murni	117.000.000.000,00
1.2.3.2.2 Kurang Bayar IIUPH	19.883.000.000,00
1.2.3.3 Dana Reboisasi	988.554.000.000,00
1.2.3.3.1 DBH Dana Reboisasi Murni	976.000.000.000,00
1.2.3.3.2 Kurang Bayar Dana Reboisasi	12.554.000.000,00
1.2.4 DBH SDA Perikanan	200.000.001.000,00
1.2.5 DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB)	467.111.978.000,00
1.2.5.1 DBH PPB Murni	463.728.978.000,00
1.2.5.2 Kurang Bayar DBH PPB	3.383.000.000,00
<b>2. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>341.219.325.651.000,00</b>
<b>3. Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>33.000.000.000.000,00</b>
<b>3.1 Dana Alokasi Khusus</b>	<b>30.200.000.000.000,00</b>
3.1.1 Pendidikan	10.041.300.000.000,00
3.1.2 Kesehatan	3.129.900.000.000,00
3.1.3 Infrastruktur Jalan	6.105.760.000.000,00
3.1.4 Infrastruktur Irigasi	2.288.960.000.000,00
3.1.5 Infrastruktur Air Minum	885.320.000.000,00
3.1.6 Infrastruktur Sanitasi	829.260.000.000,00
3.1.7 Prasarana Pemerintahan Daerah	499.740.000.000,00
3.1.8 Kelautan dan Perikanan	1.851.910.000.000,00

3.1.9 Pertanian	2.579.560.000.000,00
3.1.10 Lingkungan Hidup	548.100.000.000,00
3.1.11 Keluarga Berencana	462.910.000.000,00
3.1.12 Kehutanan	558.460.000.000,00
3.1.13 Sarana Perdagangan	730.990.000.000,00
3.1.14 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	754.740.000.000,00
3.1.15 Energi Perdesaan	467.940.000.000,00
3.1.16 Perumahan dan Permukiman	234.800.000.000,00
3.1.17 Keselamatan Transportasi Darat	235.940.000.000,00
3.1.18 Transportasi Perdesaan	301.340.000.000,00
3.1.19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	493.070.000.000,00
<b>3.2 Dana Alokasi Khusus Tambahan</b>	<b>2.800.000.000.000,00</b>
3.2.1 Infrastruktur Jalan	1.691.130.000.000,00
3.2.2 Infrastruktur Irigasi	633.980.000.000,00
3.2.3 Infrastruktur Air Minum	245.210.000.000,00
3.2.4 Infrastruktur Sanitasi	229.680.000.000,00

## 2. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

<b>1. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>16.148.773.028.000,00</b>
<b>2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>523.875.000.000,00</b>
<b>3. Dana Penyesuaian</b>	<b>87.948.647.900.000,00</b>
3.1 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah	60.540.700.000.000,00
3.2 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah	1.853.600.000.000,00
3.3 Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000,00
3.4 Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2)	91.847.900.000,00
3.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	24.074.700.000.000,00

## III. RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

### 1. RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

<b>1. Perbankan dalam negeri</b>	<b>4.398.460.306.000,00</b>
1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	4.398.460.306.000,00
<b>2. Nonperbankan dalam negeri</b>	<b>191.859.576.477.000,00</b>
2.1 Hasil pengelolaan aset	1.000.000.000.000,00
2.2 Surat berharga negara neto	205.068.831.000.000,00
2.3 Pinjaman dalam negeri neto	963.045.000.000,00
2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	1.250.000.000.000,00
2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-286.955.000.000,00
2.4 Dana investasi Pemerintah	-14.105.617.523.000,00
2.4.1 Penyertaan modal negara (PMN)	-5.005.617.523.000,00
2.4.1.1 PMN kepada BUMN	-3.000.000.000.000,00
2.4.1.1.1 PT Askrimdo dan Perum Jamkrindo	-2.000.000.000.000,00



2.4.1.1.2 PT Sarana Multigriya Finansial	-1.000.000.000.000,00
2.4.1.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-585.617.523.000,00
2.4.1.2.1 Asian Development Bank (ADB)	-390.538.924.000,00
2.4.1.2.2 International Bank for Reconstruction And Development (IBRD)	-149.435.099.000,00
2.4.1.2.3 International Finance Corporation (IFC)	-14.143.500.000,00
2.4.1.2.4 International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-31.500.000.000,00
2.4.1.3 PMN Lainnya	-1.420.000.000.000,00
2.4.1.3.1 ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-420.000.000.000,00
2.4.1.3.2 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-1.000.000.000.000,00
2.4.2 Dana bergulir	-4.000.000.000.000,00
2.4.2.1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)	-1.000.000.000.000,00
2.4.2.2 Pusat Pembiayaan Perumahan	-3.000.000.000.000,00
2.4.3 Cadangan Pembiayaan	-5.100.000.000.000,00
2.5 Kewajiban penjaminan	-1.066.682.000.000,00
2.5.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	-1.017.886.000.000,00
2.5.2 Percepatan penyediaan air minum	-2.113.000.000,00
2.5.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-46.683.000.000,00
<b>2. RINCIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NETO</b>	
<b>1. Penarikan pinjaman luar negeri bruto</b>	<b>39.132.741.421.000,00</b>
1.1 Pinjaman program	3.900.000.000.000,00
1.2 Pinjaman proyek	35.232.741.421.000,00
1.2.1 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	34.006.463.491.000,00
1.2.1.1 Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga	30.980.720.725.000,00
1.2.1.2 Pinjaman Proyek Diterushibahkan	3.025.742.766.000,00
1.2.2 Penerimaan Penerusan Pinjaman	1.226.277.930.000,00
<b>2. Penerusan pinjaman</b>	<b>-1.226.277.930.000,00</b>
2.1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-529.854.070.000,00
2.2 PT Sarana Multi Infrastruktur	-210.000.000.000,00
2.3 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-24.150.000.000,00
2.4 PT Pertamina (Persero)	-252.404.919.000,00
2.5 Pemerintah Kota Bogor	-12.498.941.000,00
2.6 Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-30.000.000.000,00
2.7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-167.370.000.000,00
<b>3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri</b>	<b>-58.810.000.000.000,00</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO